

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum didalam demokrasi, penyajian aspirasi, tuntutan serta keinginan rakyat disampaikan oleh wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Demokrasi diartikan, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah sumber kekuasaan. Para pemimpin kepala pemerintahan dipilih dari rakyat melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat, mulai dari memilih Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota hingga jabatan Kepala Desa. Implementasi merupakan proses yang sangat penting dan esensial dalam kebijakan. Sebab kita berhadapan langsung dengan generasi muda yang menjadi penerima kebijakan ini. Generasi muda saat ini sangat membutuhkan pengetahuan tentang pentingnya politik bagi kehidupan mereka di masa depan.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter kuat. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan dasar moral dan etika yang membantu peserta didik dan mahasiswa menjalani kehidupan bermasyarakat dengan sikap positif. Pendekatan yang menyeluruh ini mendukung terciptanya generasi muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga mengembangkan karakter serta nilai-nilai positif untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara (Rachman, 2023)

Penyelenggaraan pendidikan politik membawa dua tujuan dalam pengembangan pendidikan politik. Pertama kesadaran politik, dan partisipasi

politik. Kepribadian politik dipahami sebagai sikap individu terhadap permasalahan politik dan menentukan tingkat kesadaran politik individu. Hal ini dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan. Untuk membantu individu yang menghadapi masalah politik menjadi peserta aktif dalam situasi seperti itu. Tingkat partisipasi warga negara dan kaum intelektual akan dikorelasikan dengan kualitas demokrasi dan produk-produknya, seperti peraturan perundang-undangan yang tepat mengenai kualitas pelayanan publik (Azmi, 2023)

Menurut (Kantaprawira, (2006) mengartikan bahwa pendidikan politik merupakan upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi tingkat pengetahuan politik masyarakat saat ini sangatlah penting dalam kondisi bangsa masih dalam transisi, dimana tahun 2024 merupakan tahun politik sehingga masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihan untuk kemajuan daerah, Pendidikan politik di tengah masyarakat penting untuk mengubah mindset yang ada dimasyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan indikator yang sangat penting untuk memudarkan berkembangnya money politik. Dalam hal ini diperlukan tingkat pengetahuan politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara langsung dan tidak terjadinya fenomena golput dikalangan masyarakat luas (Teleumbanua, 2022)

Golput, atau golongan putih, sering kali dipilih sebagai bentuk protes terhadap ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada. Banyak pemilih merasa bahwa tidak ada kandidat atau partai yang mewakili aspirasi dan kepentingan

mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak memberikan suara. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap integritas pemilu dan praktik politik yang dianggap korup juga menjadi alasan utama mengapa sebagian orang memilih untuk golput.

Selain itu, fenomena golput juga dapat dipengaruhi oleh apatisme politik, di mana individu merasa tidak terhubung dengan proses politik atau tidak percaya bahwa partisipasi mereka akan berdampak. Banyak orang yang merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar atau diakui, sehingga mereka memilih untuk tidak terlibat. Hal ini menciptakan siklus di mana rendahnya partisipasi pemilih dapat memperkuat ketidakpuasan terhadap sistem politik, yang pada gilirannya dapat menyebabkan lebih banyak orang memilih untuk golput di masa mendatang.

Pada tanggal 27 November 2024 semua masyarakat Sumatera Utara melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur memiliki 2 calon, paslon 01 M. Bobby Afif Nasution dengan wakilnya Surya, dan calon paslon 02. Edy Rahmayadi dengan wakilnya Hasan Basri. Pemuda dalam PKS disebut PKS Muda. PKS Menjadi bawah naungan Partai Keadilan Sejahtera dan dibawah bimbingan bidang kepemudaan dan merupakan program yang dibuat PKS untuk kaum muda, program ini juga sebagai lanjutan dari program PKS pusat, sehingga PKS muda disiapkan untuk menjadi kekuatan partai. Bentuk komunitas ini dikoordinator oleh Chairul yang diharapkan menjadikan PKS dapat dikenal dan meningkatkan partisipasi politik terutama di kalangan pemuda.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih pada

Pilkada 2024 tercatat sebesar 48,53%, yang menunjukkan adanya antusiasme masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Namun, di sisi lain, angka golput masih cukup signifikan, yaitu sebesar 50% dari total daftar pemilih tetap (DPT). Persentase ini mencerminkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam proses pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diperoleh data sebagai berikut: Dari total 20 desa/kelurahan yang terdaftar, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 11.300 pemilih. Dari jumlah tersebut, total suara yang diperoleh oleh kedua pasangan calon adalah sebagai berikut: Pasangan calon Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM dan H. Surya, BSc berhasil meraih total 1.693 suara, yang setara dengan 47,49% dari total suara sah. Pasangan calon Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala memperoleh 1.872 suara, yang setara dengan 52,51% dari total suara sah. Dari total suara yang masuk, terdapat 3.565 suara sah dan 108 suara tidak sah, sehingga total jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan ini adalah 3.673 orang. Persentase suara sah mencapai 48,53%, sementara suara tidak sah hanya 1,47%. Data ini menunjukkan bahwa pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala unggul dalam perolehan suara di Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan selisih 179 suara dibandingkan dengan pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Surya. Hasil ini mencerminkan dinamika politik di daerah tersebut dan memberikan gambaran awal mengenai preferensi pemilih di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Tabel 1. 1 Hasil Perhitungan suara sementara

**HASIL PERHITUNGAN SUARA SEMENTARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROV. SUMATERA UTARA TAHUN 2024
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

No	Desa / Kelurahan	TPS	Jlh DPT	PEROLEHAN SUARA		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Pemilih
				Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM dan H. Surya, BSc	Edy Rahmayadi Dan Hasan Basri Sagala	JUMLAH		
				1	2			
6	CINTA RAKYAT	1	562	101	125	226	5	231
		2	562	79	123	202	9	211
		3	523	60	103	163	2	165
		4	566	113	86	199	7	206
		5	580	84	77	161	9	170
		6	581	110	90	200	8	208
		7	562	112	73	185	2	187
		8	585	89	130	219	5	224
		9	544	95	98	193	6	199
		10	557	102	140	242	6	248
		11	536	55	56	111	3	114
		12	570	82	95	177	5	182
		13	584	83	81	164	5	169
		14	569	73	78	151	2	153
		15	550	74	93	167	0	167
		16	541	79	79	158	11	169
		17	587	84	95	179	4	183
		18	581	64	92	156	3	159
		19	574	58	69	127	3	130
		20	586	96	89	185	13	198
TOTAL		20	11300	1693	1872	3565	108	3673
				47.49%	52.51%	48.53%	1.47 %	50.00%

Sumber data: kantor kepala desa cinta rakyat

Fenomena golput yang cukup tinggi ini perlu mendapat perhatian khusus karena dapat menjadi indikator adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik, minimnya pendidikan politik, atau kurangnya efektivitas kampanye dan sosialisasi dari penyelenggara pemilu. Selain itu, faktor-faktor seperti apatisme politik, kekecewaan terhadap calon yang tersedia, hingga hambatan administratif juga berkontribusi terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor

yang memengaruhi partisipasi dan perilaku golput dalam Pilkada 2024, agar dapat dirumuskan strategi peningkatan partisipasi yang lebih efektif di masa mendatang.

Menurut Miriam Budiardjo, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Partisipasi politik adalah salah satu kegiatan cara untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran seseorang terhadap politik adalah melalui pendidikan politik, yang bertujuan membangun kesadaran politik di masyarakat. Fokus utama dari pendidikan politik ini adalah pemilih pemula, yaitu mereka yang berusia antara 17 hingga 20 tahun atau yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum (Prayetno, 2024)

Secara umum, terdapat lima fungsi utama partai politik dalam sebuah negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, dan pengatur konflik.

1. Komunikasi politik: Partai politik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Partai menyalurkan aspirasi, pendapat, dan kebutuhan masyarakat kepada pembuat kebijakan, sekaligus menerjemahkan kebijakan pemerintah kepada publik.
2. Sosialisasi politik: Partai politik berperan dalam mendidik dan membina masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses ini membantu membentuk kesadaran politik dan nilai-nilai demokrasi di kalangan warga negara.

3. Rekrutmen politik: Partai politik bertugas mencari dan menyeleksi kader-kader terbaik untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif. Fungsi ini memastikan keberlanjutan dan kelestarian partai serta menyediakan kandidat-kandidat yang kompeten untuk memimpin.
4. Partisipasi politik: Partai politik menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, seperti dalam pemilihan umum, penyusunan kebijakan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Melalui partai, masyarakat dapat menyalurkan tuntutan dan dukungan mereka secara terorganisasi.
5. Pengatur konflik: Dalam masyarakat yang demokratis, perbedaan pendapat dan persaingan politik adalah hal yang wajar. Partai politik berperan sebagai sarana untuk mengatasi dan mengelola konflik-konflik tersebut secara damai, mencari konsensus, dan mencegah perpecahan.

Partai politik yang menjadi, salah satu peran meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dapat dilihat dengan informasi yang tersebar luas yang berisi informasi bohong atau mengarah pada sisi negatif yang mengakibatkan turunnya partisipasi politik di masyarakat. Maka dari itu peran partisipasi politik masyarakat sangat krusial untuk membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus terus memupuk partisipasi yang aktif dan konsisten, baik dalam pemilu maupun dalam proses pembuatan kebijakan public (Ivanna, 2024). Teori yang saya gunakan dalam partai politik teori perilaku (*Behavioral Theory*) menurut David Easton yaitu pentingnya perilaku individu dalam memahami dinamika partai politik, bahwa

partai politik harus responsif terhadap kebutuhan dan keinginan pemilih agar tetap relevan dalam sistem politik.

Secara bahasa kesadaran politik adalah gabungan dua buah kata yang berbeda jika dilihat dari segi makna. Kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa terhadap suatu persoalan peristiwa. Sementara politik dapat diartikan sebagai usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Jadi jika kata kesadaran dan kata politik disatukan menjadi kesadaran politik maka dapat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa tentang cara-cara atau usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Kesadaran politik memainkan peran kunci dalam mendorong partisipasi politik. Ketika warga memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik lokal dan nasional, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses politik (Prayetno, 2023). Hal ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan dan politik, dan berkaitan juga dengan minat dan perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik di lingkungan hidup.

Pendapat berbeda disampaikan oleh (Fatwa, 2016) mengatakan bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Kegiatan politik ini dapat berupa kampanye politik, memilih dalam pemilihan umum, melakukan kontak dengan politik, dan lain-lain. Namun kesadaran untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik, tidak serta-merta tumbuh dengan sendirinya, karena kesadaran harus dibangun melalui sebuah pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan sadar apabila seseorang tersebut mengetahui perbuatan apa yang sedang ia lakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran politik adalah berbagai bentuk

pengetahuan, orientasi dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik.

Untuk mengukur tingkat kesadaran politik seseorang, diperlukan sebuah indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran kesadaran politik. Untuk dapat mengukur tingkat kesadaran politik masyarakat, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan definisi kesadaran politik yang disampaikan oleh Surbakti (2010:184) yang mendefinisikan kesadaran politik adalah kesadaran setiap orang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan dan politik, dan berkaitan juga dengan minat dan perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik di lingkungan dia hidup. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur indikator kesadaran politik adalah sebagai berikut:

Pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik. Pengetahuan politik secara sederhana dapat diartikan sebagai pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan definisi, tujuan, dan juga pengetahuan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik serta menerapkan apa yang ia ketahui tentang politik dalam kehidupan sehari-hari. Minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Minat dan perhatian terhadap masyarakat dan politik di lingkungan dia hidup adalah sikap antusias terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat dalam politik serta mengikuti setiap kegiatan politik yang terjadi dalam masyarakat tempat dia hidup.

Dari beberapa uraian mengenai kesadaran politik dapat disintesis bahwa kesadaran politik adalah pengetahuan seseorang dan mengerti secara sadar akan semua hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Adapun indikator yang terdapat dalam kesadaran politik tersebut adalah pengetahuan tentang definisi politik, tujuan politik, dan kegiatan-kegiatan politik. Menerapkan pengetahuan politik dalam kehidupan sehari-hari. Minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik di tempat hidupnya. Antusias terhadap perkembangan politik dalam masyarakat, mengikuti kegiatan politik dalam masyarakat di tempat hidupnya.

Dalam konteks inilah kemudian partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menciptakan kualitas pemilu yang baik. Pengawasan pilkada diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Pengawasan pilkada semestinya melibatkan banyak pihak secara luas, termasuk kalangan media massa untuk mengawal proses penyelenggaraan pilkada dalam semua tahapannya. Komitmen kolektif kita merupakan sistem pengawasan integratif dalam pencegahan dan antisipasi terhadap berbagai bentuk pelanggaran pilkada, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi dan iming-iming: jabatan, barang, dan uang. Kesiapan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, dapat menutupi berbagai kekurangan dalam ketersediaan sistem

penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana dalam Pilkada. (Arifulloh, 2011).

Dinamika politik nasional menuju Pemilu 2024 semakin ramai, seiring dengan aksi-reaksi yang terjadi di antara kekuatan yang akan memasuki gelanggang pertarungan. Partai politik kini harus mengayuh di antara harapan publik yang tecermin dari opini publik yang berkembang, kepentingan partai lain dan tentunya kepentingan politik mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, politik yang tadinya sangat acak mulai membentuk pola yang harus dibaca secara cermat oleh elite partai. Menghadirkan capres/cawapres maupun calon anggota legislatif ke dalam kesadaran publik itu bukan perkara mudah. Tak cukup menggunakan pendekatan linear melalui beragam publisitas di media massa dan medsos. Para elite harus datang, menyapa warga, membangun interaksi, mendengarkan dengan kejernihan hati dan pikiran apa yang jadi keluh kesah mereka, serta memformulasikan masukan mereka menjadi suatu benang merah gagasan dan program yang patut diperjuangkan. Publik juga akan menangkap pancaran kejujuran, kehangatan, dan kesungguhan atau sebaliknya kepalsuan, kedangkalan, dan kepura-puraan. Di situlah konvergensi simbolik atau berbagi kesadaran bersama itu akan diuji (Setiawan, n.d.).

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk mewujudkan kehidupan baik dimasyarakat, bangsa dan negara semakin menjadi lebih beradab. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat. pendidikan adalah alat untuk membentuk kepribadian yang sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku.

Individu yang memiliki pendidikan biasanya lebih memahami hak dan kewajiban politik mereka (Pinem, 2024) Pendidikan hendaknya dijadikan dasar untuk membentuk manusia yang beradab. Sehingga pendidikan akan menjadi pola yang harus di ikuti oleh semua komponen yang ada dalam sebuah Negara. Pemilih pemula mejadi satu pusat tujuan yang akan menjadi penyambung estafet kepemimpinan bangsa indonesia saat ini. Dan diharapkan tentunya pemilih pemula dapat memahami konteks memilih cerdas dan cermat dan tidak terpengaruh oleh masalah-masalah kepemiluan saat ini, seperti kampanye hitam, memilih karena uang, golput, memilih calon karena ikut kata orang tua dan sebagainya. Diharapkan melalui pendidikan politik pemilih pemula dapat menajadi bagian budaya politik yang partisipator dan kritis terhadap calon yang akan ikut berkontestasi dalam pemilu baik presiden atau wakil presiden, kepada daerah atau pun dewan rakyat.

Generasi muda merupakan para pemilih pemula yang memiliki suara cukup besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga para pemilih pemula diharapkan mampu berkontribusi dalam kegiatan politik baik secara aktif maupun pasif. Salah satu bentuk kegiatan politik adalah ikut serta dalam kegiatan Pemilu, Pilkada, Pilkades dan lainnya. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan

mencari kesenangan, oleh karena itu, semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari (Firmanto, 2023).

Warga memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena partai ini memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. PKS dikenal sebagai partai yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publiknya, yang menarik perhatian pemilih yang menginginkan representasi ideologi Islam dalam pemerintahan. Dengan mengusung visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi masyarakat Muslim, PKS berhasil membangun basis dukungan yang solid di kalangan pemilih yang memiliki latar belakang agama yang sama.

Faktor lain yang mendorong pemilih untuk memilih PKS adalah keberadaan kader-kader yang terlatih dan memiliki integritas tinggi. PKS sering kali menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam kepemimpinan politik. Dengan menampilkan calon-calon legislatif yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pengalaman di bidang sosial, PKS memberikan keyakinan kepada pemilih bahwa mereka akan diwakili oleh individu yang kompeten dan bertanggung jawab.

Teori yang mendukung fenomena ini adalah teori identitas sosial, yang menyatakan bahwa individu cenderung memilih kelompok atau partai yang mencerminkan nilai-nilai dan identitas mereka. Dalam konteks PKS, partai ini berhasil membangun identitas yang kuat di kalangan pemilih yang menginginkan representasi Islam dalam politik. Selain itu, teori mobilisasi sumber daya juga relevan, di mana PKS memanfaatkan jaringan sosial dan sumber daya yang ada untuk mengorganisir dukungan dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam

pemilu. Dengan demikian, kombinasi antara nilai-nilai ideologis, kegiatan sosial, kualitas kader, dan strategi mobilisasi menjadi faktor kunci dalam menarik dukungan warga terhadap PKS. Serta teori Revival dan teori Resilliansi yang menyatakan bahwa, teori Revival dikemukakan oleh Dimitrios Buhalis, menggambarkan proses di mana suatu sistem, komunitas, atau entitas (seperti ekonomi, budaya, atau organisasi) bangkit Kembali setelah mengalami penurunan atau kehancuran, sedangkan teori Resilliansi di kemukakan oleh David Wilson, menyatakan bahwa fokus pada kemampuan suatu sistem untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan memulihkan ke kondisi normal atau bahkan lebih baik.

PKS memiliki struktur organisasi yang kuat dan jaringan yang luas di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Partai ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, yang mencerminkan komitmennya terhadap masyarakat. Dengan fokus pada isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, PKS tidak hanya berperan sebagai partai politik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Penelitian tentang PKS dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran partai politik dalam pembangunan masyarakat dan bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang strategi dan tantangan yang dihadapi PKS dalam mencapai tujuannya sebagai partai yang berkomitmen pada keadilan dan kesejahteraan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, meskipun tantangan seperti apatisme dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik masih ada. Salah satu

kegiatan utama PKS adalah program sosialisasi dan pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Melalui seminar, lokakarya, dan diskusi publik, PKS berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik, hak suara, dan dampak dari partisipasi politik terhadap kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpahaman yang sering menjadi alasan masyarakat untuk tidak berpartisipasi.

PKS juga aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui program-program seperti bakti sosial, bantuan kemanusiaan, dan pengembangan komunitas, PKS berusaha untuk menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat secara langsung, tetapi juga membangun kepercayaan dan kedekatan antara partai dan pemilih. Dengan cara ini, PKS berharap dapat mengubah pandangan masyarakat tentang politik dan mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan tetap ada. Banyak masyarakat yang masih merasa skeptis terhadap partai politik, termasuk PKS, karena pengalaman buruk di masa lalu atau persepsi bahwa partai politik hanya mengejar kepentingan pribadi. Oleh karena itu, PKS perlu terus berinovasi dalam pendekatan dan strategi untuk menjangkau masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi mereka. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat

dalam pengambilan keputusan, PKS dapat berkontribusi lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk penelitian karena partai ini memiliki sejarah yang menarik dan unik dalam konteks politik Indonesia. Didirikan pada tahun 1998, PKS muncul sebagai respons terhadap reformasi dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Sebagai partai yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, PKS berhasil menarik perhatian banyak pemilih dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan. Penelitian tentang PKS dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana partai ini beradaptasi dengan dinamika politik, serta bagaimana strategi komunikasi dan mobilisasi massa yang mereka gunakan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan politik yang ketat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Rendahnya tingkat kesadaran generasi muda di Desa Cinta Rakyat terhadap pendidikan politik PKS dalam pelaksanaan pilkada 2024.
2. Peran pendidikan politik PKS terhadap kurangnya partisipasi pemuda dalam kontestasi pilkada 2024 di Desa Cinta Rakyat.

1.3 Batasan Masalah

Dilihat dari luasnya cakupan dari pemaparan yang akan dibahas dalam penelitian maka dibuatlah pembatasan, hal ini perlu dilakukan karena adanya suatu keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, terkhususnya waktu, tenaga, dan

kemampuan yang relevan dalam penelitian. Sehingga dapat diharapkan penelitian ini dilakukan dengan baik dan lebih difokuskan dalam kajian pembahasan yang ada secara mendalam. Dalam hal ini peneliti membatasi masalah pada bagian: “Tingkat kesadaran generasi muda di Desa Cinta Rakyat terhadap pendidikan politik PKS dalam pelaksanaan pilkada 2024”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini adalah “ Bagaimana tingkat kesadaran generasi muda di Desa Cinta Rakyat terhadap pendidikan politik PKS dalam pelaksanaan pilkada 2024”?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: Tujuan penelitian tentang " Rendahnya kesadaran generasi muda di Desa Cinta Rakyat terhadap pendidikan politik PKS dalam pelaksanaan pilkada 2024" dapat dirumuskan sebagai berikut: “Untuk mengetahui Bagaimana bentuk kesadaran pendidikan politik PKS terhadap pelaksanaan Pendidikan Politik Generasi Muda pilkada 2024 di desa Cinta Rakyat”

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori partisipasi politik, khususnya mengenai bagaimana pendidikan politik yang dilakukan partai PKS mampu mendorong keterlibatan pemuda dalam proses politik serta bagaimana strategi pendidikan politik yang diterapkan berdampak pada peningkatan kesadaran dan partisipasi pemuda dalam pemilu khususnya dalam

konteks kontestasi Pilkada di daerah Kabupaten Deli Serdang, dengan melihat dinamika antara partai, pemuda, dan pendidikan politik.

1.6.2 Manfaat secara praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini akan membantu penulis memperdalam pengetahuan tentang bentuk kesadaran pendidikan politik PKS terhadap pelaksanaan Pendidikan Politik Generasi Muda pemilu pilkada 2024 di Desa Cinta Rakyat.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu memperkuat serta menjelaskan untuk lebih memahami peran pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik seperti PKS dalam meningkatkan kesadaran politik di Desa Cinta Rakyat.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa dalam studi hukum, budaya, dan bisnis. Mereka dapat menggunakan penelitian ini sebagai studi kasus dalam pengembangan pemahaman mereka. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa.